

KEGIATAN DPR-RI AWAL MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2011-2012

Kegiatan DPR pada awal Masa Persidangan II 2011-2012 dimulai dengan Pidato Pembukaan Masa Persidangan II dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 16 November 2011.

Masa Sidang II ini dimulai pada tanggal 14 November dan akan ditutup pada 16 Desember 2011 (selama 25 hari kerja). Dalam jangka waktu kurang dari sebulan, Dewan akan menjalankan tugas dan fungsinya di bidang legislasi, penetapan anggaran, pengawasan, dan fungsi lainnya, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu penetapan dan pencalonan para pejabat publik.

Berikut ringkasan Pidato Pembukaan masa Persidangan II 2011-2012.

Oleh: Ketua DPR RI, Marzuki Alie

Pelaksanaan Fungsi Legislasi

Dewan akan menyelesaikan 13 RUU yang sudah memasuki Pembicaraan Tingkat I, baik RUU inisiatif DPR maupun RUU dari Pemerintah. Pembahasan RUU-RUU tersebut antara lain adalah RUU Perubahan Atas UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro, RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, RUU tentang Keamanan Nasional, RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar, RUU tentang Aparatur Sipil Negara, RUU tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan beberapa RUU lainnya.

Sepanjang tahun 2011 sampai dengan akhir Masa Sidang I (28 Oktober 2011), Dewan telah menyelesaikan 18 RUU Prioritas dan 4 RUU Kumulatif Terbuka. Masa Sidang II, setidaknya ada 5-6 RUU dapat memasuki Pembicaraan Tingkat II. Dengan demikian, Komisi-Komisi, Badan Legislasi, dan Panitia Khusus harus bekerja keras menuntaskan berbagai RUU tersebut. Komisi-Komisi ataupun Baleg yang telah mengajukan berbagai RUU inisiatif yang diusulkan masuk Prolegnas maupun dalam prioritas tahunan, harus konsekwen untuk menyelesaikan rumusan RUU dan menyiapkan naskah aka-



demik, dengan didukung oleh para tenaga ahli perundang-undangan dan masukan dari para pakar dan masyarakat.

Menjelang Penutupan Masa Sidang I 2011-2012, ada 4 RUU yang amat berarti bagi kepentingan masyarakat dan pembangunan perekonomian nasional, yang telah dapat diselesaikan. Keempat RUU tersebut adalah RUU tentang Bantuan Hukum, RUU tentang Pengelolaan Zakat, RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Disetujuinya RUU tentang Pengelolaan Zakat yang semula berjudul RUU tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS), memiliki arti penting dalam program pengentasan kemiskinan, mengingat sudah 66 tahun merdeka, RUU tentang Pengelolaan Zakat belum juga diundangkan. Undang-Undang ini merupakan sistem hukum positif dalam penerapan prinsip-prinsip syariah, dimana negara memiliki peran dalam memberikan pelayanan, perlindungan dan jaminan kepada seluruh fakir miskin yang menjadi mustahik utama zakat.

RUU tentang BPJS juga telah disetujui untuk disahkan menjadi UU menjelang akhir Penutupan Masa Sidang

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA : BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: penerbitan@dpr.go.id; www.dpr.go.id/berita **PENGAWAS UMUM:** Pimpinan DPR-RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:** Dra. Nining Indra Saleh, M.Si (Sekretariat Jenderal DPR-RI) **WAKIL KETUA PENGARAH:** Achmad Djuned SH, M.Hum **PIMPINAN PELAKSANA:** Jaka Dwi Winarko **PIMPINAN REDAKSI:** Djustiawan Widjaya (Kabag Pemberitaan & Penerbitan) **WK. PIMPINAN REDAKSI:** Liber S. Silitonga (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan) **ANGGOTA REDAKSI:** Dra. Trihastuti, Nita Juwita, S.Sos; Sugeng Irianto, S.Sos; Iwan Armanias; Suciati, S.Sos; Faizah Farah Diba; Agung Sulistiono, SH; M. Ibnur Khalid; **PENANGGUNGJAWAB FOTO:** Rizka Arinindya **SIRKULASI:** Supriyanto **Diterbitkan Oleh:** Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR-RI Sejak Mei 1991

I 2011-2012. Pembahasan atas RUU ini benar-benar menguras energi anggota Pansus maupun Pemerintah, dan telah mengundang perhatian masyarakat, khususnya kalangan pekerja maupun buruh. Bahkan, RUU ini adalah satu-satunya RUU dimana Pimpinan Dewan terlibat langsung dalam melakukan pendekatan dan mencari solusi bagi penyelesaian substansi krusial. Waktu pembahasan RUU ini kurang lebih 1 tahun 28 hari, dan melibatkan 8 menteri yang ditunjuk Presiden dibawah koordinator Menteri Keuangan. Kesepahaman yang sulit ditemukan antara DPR dan Pemerintah adalah mengenai transformasi BPJS-2 (BPJS Ketenagakerjaan) dan awal mulai beroperasinya. Sebagai penginisiatif RUU, DPR berketetapan untuk melaksanakan amanat Pembukaan UUD 1945 Alinea 4 dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 dan melaksanakan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Disetujuinya RUU tentang BPJS, akan memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan UU tentang SJSN secara efektif, efisien, dan terarah, sesuai dengan standar kompetensi dan profesionalisme, sehingga mampu memperluas cakupan kepesertaan, dan meningkatkan manfaat jaminan sosial sebesar-besarnya bagi terpenuhinya kebutuhan dasar hidup rakyat secara layak.

Dalam menjalankan fungsi legislasi, Dewan dihadapkan pada kenyataan bahwa UU yang sudah selesai dibahas dan diundangkan, ternyata beberapa waktu kemudian dimohonkan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Yang terbaru adalah uji materi atas UU No. 11 tahun 2011 tentang Mahkamah Konsitusi pada Pasal 45A dan Pasal 57 ayat 2A. Melihat sedemikian sering putusan MK membatalkan pasal-pasal UU yang telah disahkan oleh Dewan, Pimpinan Dewan mengharapkan, kedepan, substansi materi RUU yang akan dihasilkan harus dijaga agar tidak bertentangan dengan UUD 1945. DPR tidak dapat menghalangi uji materi yang diajukan masyarakat, karena hal ini dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Fungsi Anggaran

RAPBN yang dibahas bersama DPR setiap tahun, disusun berdasarkan asumsi makro ekonomi menurut pertimbangan eksternal perekonomian dunia serta didasarkan pada kondisi dan permasalahan nasional dan daerah yang dihadapi bangsa Indonesia. Tantangan APBN adalah kemampuan Pemerintah untuk mensejahterakan rakyat, dan merupakan sarana untuk mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945.

Dalam RAPBN 2012, pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan 6,7% harus tercapai. Tahun ini, Pemerintah berupaya mempertahankan pertumbuhan ekonomi di angka 6,5% ditengah krisis perekonomian global. Angka pertumbuhan ini terus bergerak dan harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dewan sependapat dengan Pemerintah, agar belanja modal dilakukan dengan benar, investasi terus digalakkan, target ekspor dipertahankan, dan sektor riil harus bergerak dengan baik.



Internet/ marzuki@le.com

Terhadap berbagai asumsi dasar RAPBN 2012, Badan Anggaran memberikan beberapa catatan diantaranya, Pemerintah harus menjaga pertumbuhan ekonomi selama menghadapi gejolak ekonomi global melalui penyerapan anggaran dan menyederhanakan proses birokrasi. Target yang diperlukan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 6,7% adalah penurunan tingkat kemiskinan, penyerapan tenaga kerja melalui penyediaan lapangan kerja, dan penurunan tingkat pengangguran terbuka. Dalam optimalisasi pelaksanaan APBN 2012, Dewan meminta kepada para menteri baru di bidang ekonomi hasil reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II, agar siap menghadapi berbagai persoalan berat. Sebab, dari sisi eksternal tekanan ketidakpastian perekonomian dunia masih akan terus mempengaruhi. Pada sisi internal sektor riil harus dapat dipacu. Kepiawaian para menteri di bidang ekonomi akan sangat menentukan kondisi perekonomian Indonesia ke depan. Dewan berharap agar para menteri mengutamakan profesionalitas, kompetensi dan mempunyai komitmen yang kuat sebagai faktor pendukung dalam menghadapi tantangan global.





Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Berbagai permasalahan yang berkembang di masyarakat akhir-akhir ini, telah menyita perhatian kita. *Pertama*, berbagai permasalahan di wilayah Papua kembali menjadi sorotan. Paling tidak, tercatat tiga masalah di Papua yaitu isu separatisme, kesenjangan sosial ekonomi dan rasa ketidakadilan, serta konflik antara karyawan dan manajemen PT. Freeport Indonesia. Kongres Papua III pada pertengahan Oktober 2011 berakhir ricuh dan memakan korban jiwa. Teror dan pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata juga telah menewaskan Kapolsek Mulia Puncak Jaya.

Akar permasalahan konflik yang ada di Papua sebenarnya adalah rasa ketidakadilan dan belum meratanya kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat Papua, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Masyarakat Papua ingin dihargai sebagai manusia yang bermartabat, untuk itulah perlu dilakukan dialog secara konstruktif dalam menciptakan kedamaian di bumi Papua. Semua permasalahan ini memerlukan penanganan serius, tidak hanya pernyataan keprihatinan saja, tetapi harus dibarengi dengan langkah-langkah kongkret dari Pemerintah.

Pemerintah baru-baru ini, telah membentuk Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) melalui Perpres No. 65 tahun 2011. Unit ini harus diberikan kesempatan untuk bekerja efektif, efisien, dan terutama melakukan komunikasi intensif dengan mengedepankan dialog untuk menemukan solusi.

Provinsi Papua dan Papua Barat sebenarnya telah mendapatkan status otonomi khusus berdasar UU No. 21 tahun 2001 yang telah diubah dengan UU No. 35 tahun 2008. Pemberian otonomi khusus merupakan kebijakan politik yang tepat, merupakan langkah awal untuk membangun kepercayaan masyarakat Papua. Dana otonomi khusus yang telah dikucurkan mencapai Rp. 30 triliun, tetapi masyarakat Papua tidak merasa ada peningkatan kesejahteraan, karena otonomi khusus tidak berjalan efektif dan amanat UU ini belum dilaksanakan secara maksimal. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan UU otonomi khusus dan

tata kelola otonomi khusus harus diperbaiki. Oleh karena itu, Dewan meminta agar dilakukan langkah-langkah kongkret yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan. Pekerjaan rumah kita semua adalah, bagaimana mendorong kesadaran generasi muda Papua sebagai bagian dari bangsa Indonesia, bagaimana Papua merasa memiliki Indonesia.

Untuk penyelesaian masalah PT. Freeport Indonesia, kita meminta kepada manajemen agar memperhatikan tuntutan karyawan. Mereka merasa kurang mendapatkan keadilan akibat ketidakseimbangan kontrak karya yang ada. Manajemen harus melakukan dialog dengan karyawan untuk menyelesaikan permasalahan dengan mengedepankan sisi kesejahteraan, keadilan, dan kemanusiaan. Pemerintah berkewajiban untuk memfasilitasi dan memediasi supaya permasalahannya dapat diselesaikan dengan baik.

Kedua, tindak pidana korupsi dan terorisme telah mencederai perasaan rakyat. Pemberian pengurangan masa pidana (remisi) dan pembebasan bersyarat kepada pelaku tindak pidana korupsi dan terorisme, juga sangat mengecewakan rakyat. Namun, Dewan memahami rencana Pemerintah untuk melakukan moratorium pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana korupsi dan terorisme. Perlu kiranya moratorium tersebut dikaji secara komprehensif agar tidak melanggar HAM dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kajian tersebut perlu dilakukan, mengingat pemberian remisi dan pembebasan bersyarat merupakan hak bagi semua narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Ketiga, wacana yang berkaitan dengan putusan hakim pengadilan Tipikor di daerah, telah mengundang polemik di masyarakat. Bahkan, ada wacana untuk dilakukan pembubaran Pengadilan Tipikor di Daerah. Dewan menyarankan agar permasalahan ini dilakukan evaluasi dalam forum sarasehan ataupun forum sejenis lainnya antar lembaga penegak hukum dan lembaga lain yang dianggap penting. Evaluasi ini perlu, untuk menemukan satu kesepahaman tentang pene-

rapan hukum dalam peradilan Tipikor.

Keempat, permasalahan pelaksanaan ibadah haji. Proses ibadah haji 2012 baru saja berakhir, namun ribuan jemaah haji Indonesia masih berada di Arab Saudi menunggu keputusannya sesuai Kloter yang telah ditetapkan. Untuk pengawasan haji tahun ini, DPR telah membentuk 2 (dua) tim, yaitu Tim Pertama yang melakukan pengawasan terhadap persiapan penyelenggaraan haji, dan Tim Kedua yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan haji yang dipimpin oleh Ketua DPR-RI.

Banyak permasalahan yang ditemukan, baik oleh Tim Pertama maupun Tim Kedua, khususnya berkaitan dengan akomodasi, sarana dan prasarana, transportasi, makan bagi jemaah, dan pelayanan kesehatan. Permasalahan tersebut adalah permasalahan klasik yang selalu berulang setiap tahunnya, walaupun Dewan tidak menafikkan adanya perbaikan yang telah dilakukan oleh Pemerintah. Pengelolaan haji bukan hanya masalah peribadatan pelaksanaan Rukun Islam ke-5 bagi umat Islam, tetapi lebih banyak terkait dengan manajemen dengan tujuan bagaimana para jemaah dapat melaksanakan semua ritual haji dengan nyaman, tenang, dan mendapatkan semua hak-haknya selama berada di tanah suci. Tentunya, semua temuan tersebut merupakan tanggungjawab bersama Pemerintah dan Dewan untuk dicarikan solusi, agar masalah-masalah tersebut tidak terulang kembali di masa-masa yang akan datang.

Kelima, Sea Games ke-26 di Palembang. Terhadap kegiatan Sea Games tanggal 11-22 November 2011 yang telah dibuka di Jakabaring Sport City Palembang, Dewan menyampaikan dukungan agar kontingen Indonesia dapat kembali menjadi juara umum pada SEA Games tahun ini. Indonesia pernah berjaya pada SEA Games tahun 1977, 1979, 1981, 1983, 1987, 1989, 1991, 1993, dan terakhir menjadi juara umum pada 1997.

Kegiatan Internasional

DPR memberikan perhatian dan dukungan positif terhadap penyelenggaraan KTT ASEAN ke-19 di Bali tanggal 17-19 November 2011. Pada KTT ini, akan ditandatangani 5 kerjasama baru dan disiapkan ASEAN *roadmap* menuju era *millenium development goals*, serta kesepakatan negara-negara anggota dengan menyikapi isu-isu perubahan iklim. Dengan mengusung tema “*ASEAN Community in a Global Community of Nations*”, Indonesia sebagai pemimpin ASEAN 2011, akan berupaya untuk memimpin ASEAN menuju masa depan yang lebih baik. Kehadiran Sekretaris Jenderal PBB dan Presiden Amerika Serikat serta Rusia sebagai anggota baru KTT Asia Timur menjadi penting dan menarik, tidak saja bagi Indonesia tapi juga bagi mata dunia. Pertemuan para Kepala Negara merupakan terobosan diplomatik untuk dapat menghasilkan kemajuan baru bagi kehidupan yang lebih baik. Fokus sekaligus target melalui kemajuan pencapaian menuju komunitas ASEAN 2015, upaya memastikan

kawasan ASEAN menjadi wilayah aman dan kondusif, serta keinginan Indonesia untuk memberikan target baru ASEAN pasca tahun 2015, diharapkan dapat tercapai melalui KTT ini. Kemajuan baru ini juga akan mengesahkan lahirnya Bali Concord III yang berupa rencana sasaran bersama ASEAN dengan melewati terwujudnya Komunitas ASEAN 2015 menuju peran global 2022. Deklarasi Bali Concord III akan menjadi pijakan bagi pengaturan hubungan di tingkat regional ASEAN ke arah tuntunan kerjasama antar kawasan ditengah komunitas antar bangsa.

Pada masa-masa terakhir sebagai Ketua ASEAN 2011 dan empat tahun menjelang terwujudnya Komunitas ASEAN 2015, Dewan berharap bahwa Indonesia tidak hanya mengaggas tapi memastikan langkah bahwa fondasi yang terbangun dapat menegakkan kondisi politik, keamanan, sosial budaya, serta dapat bergerak maju mengimbangi dinamika tuntutan lain yang bergerak cepat ditengah arus globalisasi.

Berkaitan dengan pertemuan yang berskala internasional lainnya, dua bulan ke depan, DPR akan menjadi tuan rumah *The 7th Session of The Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) Conference and Related Meetings*, di Palembang. PUIC didirikan demi membina koordinasi antara bangsa-bangsa di dunia dalam rangka untuk menghormati dan membela hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kemanusiaan dan perdamaian berdasarkan keadilan. Sebagaimana diketahui, Ketua DPR-RI telah terpilih sebagai Presiden *Parliamentary Union of OIC Member States (PUIC)* untuk periode 2012-2014. Dalam posisi ini, tentu saja banyak sekali tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan harapan PUIC sebagai lembaga yang kredibel dalam menyuarakan kepentingan negara-negara anggota OIC.

Berkaitan dengan penyelenggaraan *The 7th Session of The Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) Conference and Related Meetings*, di Palembang, dukungan dari para anggota Dewan amat diharapkan demi suksesnya penyelenggaraan, baik dari segi substansi maupun teknis. Partisipasi para anggota yang akan tergabung dalam Delegasi DPR-RI sangat diharapkan.*



DPR selesaikan 22 RUU

DPR telah menyelesaikan 18 (delapan belas) RUU prioritas dan 4 (empat) RUU kumulatif terbuka sepanjang tahun 2011, tepatnya sampai akhir Masa Persidangan I Tahun Sidang 2011-2012, tanggal 28 Oktober 2011.

Hal itu diungkapkan Ketua DPR RI, Marzuki Alie dalam Rapat Paripurna pembukaan Masa Persidangan II Tahun 2011-2012, di Gedung Nusantara II DPR, Senin (14/11).

Menurut Marzuki, penyelesaian berbagai RUU masih jauh dari target yang telah ditetapkan. Namun demikian, lanjutnya, kita patut bersyukur menjelang penutupan Masa Sidang I ada 4 (empat) RUU yang amat berarti bagi kepentingan masyarakat dan pembangunan perekonomian nasional telah dapat diselesaikan. Keempat RUU tersebut adalah RUU tentang Bantuan Hukum, RUU tentang Pengelolaan Zakat, RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan RUU tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS), tambahnya.

Untuk itu, Komisi-komisi, Badan Legislatif (Baleg), dan Panitia Khusus (Pansus) untuk bekerja keras menuntaskan berbagai RUU tersebut. Komisi-komisi ataupun Baleg yang telah mengajukan berbagai RUU inisiatif yang diusulkan masuk Program Legislatif Nasional (Prolegnas) maupun dalam prioritas tahunan agar konsekuen untuk menyelesaikan rumusan RUU dan menyiapkan naskah akademik, dengan didukung oleh para tenaga ahli perundang-undangan dan masukan dari para pakar dan masyarakat, himbaunya.

Dia menambahkan, tahun 2012 adalah tahun yang paling ideal bagi DPR untuk memacu pelaksanaan fungsi legislasi. Momentum ini harus benar-benar dimanfaatkan oleh DPR guna memenuhi amanat Pasal 20 UUD 1945, tambahnya. "Karena saya khawatir pertengahan tahun 2013 situasi politik sudah kurang kondusif, karena persiapan menghadapi Pemilu 2014, dan hal ini sudah tentu akan berpengaruh pada kinerja DPR," tuturnya. Mudah-mudahan dalam Masa Sidang II yang hanya berjalan kurang dari satu bulan, setidaknya ada 5 (lima) atau 6

(enam) RUU dapat memasuki Pembicaraan Tingkat II, harap Marzuki.

Lebih jauh Marzuki mengatakan, DPR senantiasa mendapatkan kritik masyarakat karena rendahnya produk UU yang dihasilkan, lebih-lebih bila dikaitkan dengan prioritas tahunan Prolegnas. Namun disisi lain, ungkapnya, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa UU yang sudah selesai dibahas dan diundangkan, ternyata beberapa waktu kemudian dimohonkan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Yang terbaru adalah uji materi atas UU No.11 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi pada Pasal 45A dan Pasal 57 ayat (2A)," tambahnya. Artinya, MK telah membatalkan pasal ini dengan beberapa argumentasi. Terhadap Pasal 57 ayat (2A) tentang komposisi Majelis Kehormatan Mahkamah

Konstitusi, MK juga telah membatalkannya dengan argumentasi bahwa komposisi Majelis Kehormatan MK berpotensi mengancam kemandirian MK.

Melihat hal ini, jelasnya, kita seringkali bertanya-tanya demikian seringnya UU diujimaterikan di MK dan sedemikian sering putusan MK membatalkan pasal-pasal, yang pada saat Pembahasan Tingkat I di DPR memerlukan diskusi dan dialog yang cukup lama. DPR tidak dapat menghalangi uji materi yang diajukan masyarakat, karena hal ini dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

"Kedepan substansi materi RUU yang akan dihasilkan harus dijaga agar tidak bertentangan dengan UUD 1945," harap Marzuki.(iw)/foto:iw/parle.



Komisi X DPR Soroti Soal Transportasi

Anggota Komisi X DPR RI, TB. Dedi Suwandi Gumelar (F-PDI Perjuangan) menyoroti persoalan transportasi dalam arena Sea Games ke XXVI di Jakabaring, Palembang.



Anggota komisi X DPR RI, TB. Dedi Suwandi Gumelar saat memberikan keterangan kepada wartawan menyoroti masalah transportasi dalam arena Sea Games ke-26 di Jakabaring, Palembang

Pasalnya, masih ada supir yang belum dibayar walaupun sudah ada yang dibayar tetapi pembayarannya telat.

“Bahkan masyarakat setempat (para penumpang) yang ingin menonton pertandingan atau para atlet naik mobil angkot itu ada yang bayar tapi ada pula yang tidak bayar,” ungkapnya usai menyaksikan lomba renang di Stadion Akuatik, Jakabaring, Palembang, Kamis (17/11)

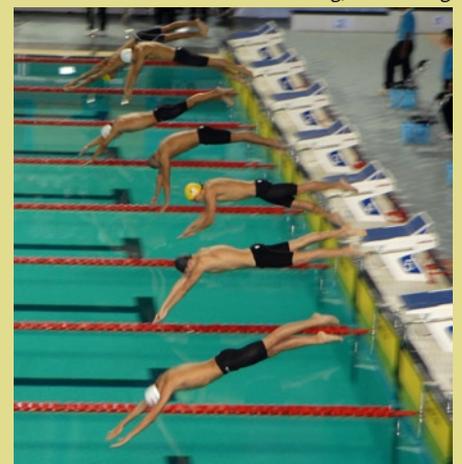
Menurutnya, kalau hanya tersedia dengan lima bus yang berbahan bakar gas (BBG) saya kira tidak cukup mengcover sekian banyak orang, baik atlet maupun para penonton.

Ia menghimbau kepada panitia penyelenggara dalam hal ini Inassoc untuk segera memperhatikan dan memperbaiki keluhan yang dialami oleh pengguna bus atau angkot disekitar arena pertandingan Jakabaring dalam waktu sisa ini. “Karena itu menyangkut masalah tamu-tamu asing yang ada disini, jadi harus ditambah bus itu,” tambahnya.

Oleh karena itu, jelas Dedi, Komisi X DPR datang ke Jakabaring untuk melihat langsung bagaimana pelaksanaan di lapangan. Sejauhmana pelaksanaannya dan sejauhmana selama ini yang kita khawatirkan pelaksanaannya. “Kalau memang berjalan dengan lancar ya bagus,” tuturnya.

Dia menambahkan, kalau ada kekurangan dalam penyelenggaraan dan sebagainya nanti ada fungsi pengawasan kita untuk mengauditnya. Dedi memberi contoh, seperti mengaudit pekerjaannya seperti apa, mengaudit proses keuangannya dan sebagainya. “Yang jelas kita tidak tinggal diam,” kata Dedi seraya menambahkan nanti kita minta pertanggungjawabannya. Jadi segala kekurangan selama sisa waktu sampai penutupan harus diperbaiki, tambahannya.

Dedi mengajak kepada masyarakat untuk memberikan dukungan dan semangat kepada para atlet Indonesia berprestasi agar tidak terganggu dengan hal-hal yang sifatnya tidak substansial, dan berharap Indonesia men-



jadi juara umum. “Kita sudah lihat buktinya perenang Indonesia I Gede Siman Sudartawa yang memecahkan rekor Sea Games nomor 100 meter gaya punggung putra dengan waktu yang begitu mengejutkan yaitu 55,59 detik,” kata Dedi.

Indikasinya ‘kan cukup bagus, dan perbedaan dari perolehan medali kita lihat cukup jauh, jadi harus juara umum, himbuhnya.(iw)/foto:iw/parle.

Paska Konflik Poso, Kondisi Keamanan Sulteng Kondusif

Kondisi keamanan di provinsi Sulawesi Tengah umumnya dan kabupaten Poso khususnya kini dalam kondisi sangat kondusif, setelah berakhirnya konflik horisontal beberapa tahun terakhir.



Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tengah, Tb Hasanuddin (tengah)

Hal itu dikatakan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola saat pertemuan dengan Tim Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI di ruang kerjanya baru-baru ini (9/11).

Gubernur menjelaskan, pemerintah daerah bersama sejumlah elemen masyarakat telah membentuk Forum Komunikasi antar Umat Beragama (FKUB) sebagai wadah dialog antar umat beragama dan pemuka masyarakat di Sulteng dalam menyikapi berbagai persoalan. “Kami mengedepankan antisipasi melalui jalan dialog sebelum gejolak terjadi di masyarakat,” ucapnya. Gubernur memaparkan meski masih ada beberapa gejolak di masyarakat beberapa waktu terakhir, namun hal itu terjadi karena dorongan emosi spontan saja. “Memang ada satu dua gejolak di masyarakat, namun itu tidak bersifat masif,” tuturnya menjelaskan.

Gubernur Longki Djanggola mengungkapkan, yang masih menjadi per-

soalan adalah permasalahan keperdataan, misalnya persoalan tumpang tindih kepemilikan tanah. “Persoalan keperdataan ini bisa memicu terjadinya konflik di masyarakat di masa datang,” jelasnya. Kepada pemerintah pusat gubernur meminta agar memperhatikan persoalan keperdataan ini misalnya dengan mengeluarkan regulasi yang jelas dan tidak tumpang tindih.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI yang juga Wakil Ketua Komisi I, Tubagus Hasanuddin (F-PDIP) mengatakan, salah satu tujuan kedatangan Tim Komisi I ke Sulteng ini adalah untuk mengetahui kondisi Sulteng paska konflik Poso. “Kami datang untuk menggali informasi mengenai kondisi keamanan termasuk di Poso, sekaligus untuk memberi masukan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah pusat,” tukas Tb. Hasanuddin memaparkan. Terkait permasalahan keperdataan yang belum tuntas, Tb Hasanuddin

mengatakan seharusnya persoalan keperdataan bisa diselesaikan di tingkat kabupaten.

“Kondisi Poso saya lihat sudah aman, kerukunan umat beragama pun sudah sangat baik, namun persoalan keperdataan memang harus segera diselesaikan, karena jika hal itu dibiarkan akan menjadi semacam titik api yang bisa meledak lagi,” ucap Tb. Hasanuddin mengingatkan.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini mengatakan segala masukan dari pemerintah daerah dan aspirasi masyarakat khususnya terkait persoalan keamanan akan menjadi catatan Komisi I saat rapat dengan kementerian terkait di gedung DPR Senayan Jakarta. Khusus persoalan keperdataan, Tubagus berjanji akan meneruskan persoalan tersebut kepada pihak Badan Pertanahan Nasional pusat.

Selain melakukan pertemuan dengan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Tim Komisi I DPR RI juga melakukan pertemuan dengan Komando Korem 132/Tadulako Kolonel (Inf) Muslimin Akib, Komandan Lanal Palu Kolonel Laut (P) Budi Utomo dan Kepala Dinas Operasi Pangkalan Udara Sultan Hasanuddin Kolonel PNB Palito Sitorus. Selain itu Tim juga melakukan pertemuan dengan jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan perusahaan operator telekomunikasi, LPP TVRI dan RRI, LKBN Antara, serta PT Pos Indonesia.

Tim Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke prov. Sulawesi Tengah : Tubagus Hasanuddin (Wakil Ketua Komisi I DPR RI/F-PDIP), KRMT Roy Suryo Notodiprodjo dan Mayjen TNI (Purn.) Salim Mengga (F-PD), Paskalis Kossay (F-PG), H. Tri Tamtomo dan Sidharto Danusubroto (F-PDIP), Indra dan HM Gamari Sutrisno (F-PKS), H. Lily Chodidjah Wahid (F-PKB), dan H. Ahmad Muzani (F-Geindra). (Wrij.Tvp)foto:wrij/tim parle

Komisi VII DPR Prihatin Maluku Dijatahi BBM 1 Persen

“Saya merasa sedih Provinsi Maluku dijatahi BBM 1 persen dari kuota nasional,” kata Daryatmo Mardiyanto dari F-PDI Perjuangan saat berdialog dengan Gubernur Maluku, Karel Albert Ralalahu dalam rangka kunjungan kerja Komisi VII DPR ke Provinsi Maluku, Senin (31/10).

Menurut Daryatmo, memang tidak pernah ada data yang sama antara Pemda, BPH Migas dan Pertamina serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. “Saya sampai binggung, koq bisa data ini dimanipulasi seperti ini,” he-rannya. Jadi kalau ada data yang sama kami berharap menjadi pegangan bagi Pemda untuk data yang standar tentang nelayan, budidaya ikan maupun transportasi laut bagi daerah ini, tambah-banya.

Karena, lanjutnya, Kementerian ESDM sebelumnya menyebutkan dengan amat sangat pasti bahwa harga BBM di Papua sampai ke puncak gunung harganya Rp 4.500,-/liter. Kenapa harga bensin di kabupaten Maluku Barat Daya mencapai Rp 20.000,-/liter, kata Daryatmo dengan rasa heran. “Berarti Kementerian ESDM berbohong, karena mengatakan di seluruh wilayah harga BBM Rp 4.500,-/liter,” tegasnya.

Daryatmo menambahkan, UU No.22 Tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi menegaskan bahwa pemerintah wajib menjamin ketersediaan energi sebagai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Karenanya kalau ada harga BBM yang berbeda itu amat menyakitkan, tambahnya.

Untuk itu, saya dapat diberikan angka finalisasi yang tepat atas sebuah data yang standar tentang nelayan, budidaya ikan maupun transportasi laut yang memerlukan bahan bakar solar itu supaya jelas, dan disitulah kita bisa menelusuri masalah ini. “Nanti setelah pulang dari Maluku, Komisi VII akan memperdalam masalah ini dan

Komisi VII DPR merasa prihatin Provinsi Maluku dijatahi BBM 1 persen dari kuota nasional karena 90 persen wilayahnya adalah laut.

akan kita kejar habis, jangan sampai orang paling timur justru paling menderita. Salah-salah nanti Maluku lepas juga dari NKRI, tapi kami tidak menginginkan untuk itu, karena kami cinta Maluku,” himbunya.

Sementara Gubernur Provinsi Maluku, Karel Albert Ralalahu juga merasa heran dengan sikap pemerintah pusat. Betapa tidak, Bahan Bakar Minyak

dengan wilayah Maluku. Karena, lanjutnya, di Maluku ada ratusan kapal ikan yang melakukan operasi. “Coba kita lihat di laut Arafura, laut Banda, berapa banyak kapal yang beroperasi, terus dari mana mereka memperoleh jatah BBM,” tegasnya.

Menurutnya, jatah 1 persen dari total minyak nasional untuk Provinsi Maluku tidak cukup untuk Maluku.



Anggota DPR dari F-PDI Perjuangan Daryatmo Mardiyanto

(BBM) untuk Provinsi Maluku hanya dijatahi 1 persen dari kuota nasional. “Saya baru tahu hari ini bahwa kita di Maluku hanya mendapatkan jatah minyak 1 persen dari kuota nasional,” ujar Karel. Jatah BBM yang hanya 1 persen untuk Provinsi Maluku dari kuota nasional terungkap saat PT. Pertamina menyampaikan hal itu dalam pertemuan tersebut.

Karel mengatakan, jatah ini sangat tidak masuk akal bila dibandingkan

Apalagi wilayah Maluku terdiri dari pulau-pulau yang membutuhkan banyak BBM. “Berapa banyak kapal ikan yang melayari laut di Maluku, itu ‘kan membutuhkan BBM yang tidak sedikit jumlahnya,” paparnya.

Ia berjanji dalam waktu dekat akan memperjuangkan jatah BBM untuk Maluku di pemerintah pusat, terutama Pertamina untuk dinaikan. “Kita akan perjuangkan jatah untuk Maluku. Masa jatah Maluku hanya 1 persen dari total

kuota BBM nasional. Ini ‘kan sangat tidak masuk akal,” jelas Karel dengan rasa keheranannya.

Sementara Ketua Komisi B DPRD Maluku, Melky L. Frans meminta kepada Pertamina untuk melakukan distribusi bahan bakar secara merata di seluruh kabupaten/kota di Maluku. Akibat pendistribusian yang tidak merata membuat sejumlah kabupaten/kota di Maluku mengalami kekurangan jatah BBM. Coba bayangkan, kata Melky, harga bensin di kabupaten Maluku Barat Daya mencapai Rp 20.000,-/

liter. “Ini ‘kan sangat menyengsarakan rakyat,” tegasnya.

Bahkan, lanjutnya, untuk mendistribusikan BBM ke kabupaten/kota di Maluku, masyarakat atau pengusaha harus menggunakan kapal-kapal penumpang yang resikonya cukup berat untuk keselamatan kapal dan penumpang.

“Kami sudah bertemu dengan BP Migas meminta perhatian mereka terkait dengan distribusi BBM di Maluku. Distribusinya harus merata dan harus menggunakan sarana transportasi

yang layak, sehingga tidak berpengaruh terhadap harga jual,” himbuhnya.

Ia mengusulkan kepada Komisi VII agar ada penambahan kuota bagi daerah Maluku dan perbesar BBM bersubsidi. Karena minyak di daerah perbatasan Maluku Barat Daya yang pulau-pulau kecil itu harganya di atas Rp 20.000,-/liter, itu pun untuk mendapatkannya juga sangat sulit. “Ini ‘kan ironis sekali dengan masyarakat disana yang sudah miskin sulit pula untuk mendapatkan minyak,” tuturnya.(iw)/foto:iw/parle.

Indonesia dan Korea Utara Sepakat Saling Dukung di Forum Internasional

DPRRI dan Parlemen Korea Utara sepakat untuk saling mendukung di forum-forum Internasional dalam rangka meningkatkan kerjasama kedua negara.



Kunjungan Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI ke Parlemen Korea Utara

Demikian salah satu point penting hasil kunjungan Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI ke Parlemen Korea Utara yang dilakukan pada tanggal 6-12 November 2011.

Nanang Samodra selaku Ketua Delegasi mengemukakan hubungan persahabatan Indonesia-Korea Utara telah terjalin dengan erat dan sangat kokoh sejak era Presiden Soekarno dan Presiden Kim Il Sung disamping

hal tersebut kedua parlemen sepakat untuk peningkatan persahabatan antara Indonesia dan Korea Utara melalui kerjasama bilateral antar parlemen kedua negara dan mendorong tercapainya kerjasama bilateral antara Indonesia dan Korea Utara di bidang sosial budaya, khususnya dibidang pendidikan.

Nanang Samodra menambahkan selama di Korea Utara delegasi menin-



jau beberapa instalasi vital guna melihat kemajuan teknologi dan industri yang telah dicapai oleh Korea Utara, terutama kreativitas dalam mengintegrasikan mesin-mesin manual-analog dengan teknologi digital sehingga produk-produk yang dihasilkan sangat awet dan bermutu tinggi. Selain itu delegasi DPR-RI juga menyempatkan diri untuk mengadakan pertemuan dengan masyarakat Indonesia yang bermukim di Pongyang sebagai upaya menyerap aspirasi rakyat dan melakukan dialog khususnya yang terkait dengan tugas dan fungsi DPR RI. (Issmeg)foto:tim parle

Komisi I DPR RI Terima Dubes Iran Terkait Program Nuklir

Komisi I Bidang Luar Negeri DPR menerima Duta Besar Iran untuk Indonesia Mahmoud Farazande, guna menjelaskan kondisi terkini terkait ancaman serangan militer Israel terhadap Iran.

“Kami ingin mendapat penjelasan langsung mengenai perkembangan mutakhir terkait ancaman Israel dan Amerika yang akan menyerang Iran terkait isu pengembangan nuklir untuk senjata,” kata Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq di gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/11).

Komisi I juga ingin mengetahui perkembangan pengawasan pengembangan nuklir yang sudah dilakukan badan dunia IAEA.

Mahfudz Siddiq mengatakan penjelasan yang disampaikan bahwa Iran suatu negara yang mengembangkan nuklir untuk kepentingan damai bukan perkara baru. Hal ini sudah dilakukan sejak jaman sahiran, dan bahkan dulu Negara-negara Amerika dan

Europa Barat memberikan dukungan yang luar biasa. Namun sikap dukungan Negara Barat dan Amerika berubah sejak ada Refolusi Iran, ketika Iran tidak lagi menjadi suatu kekuatan politik yang menjadi sekutu utama Amerika dan Barat.

Terkait adanya sinyal bahwa ancaman perang dengan Israel, Menurut perhitungan Mahfuds Siddiq, ancaman perang Israel amerika kepada iran tidak akan terjadi. “kalau hitung-hitungan saya ini hanya gertakan saja,” katanya.

Berdasarkan pengamatannya, ketika Amerika dulu menjalankan skenario perang Irak-Iran, sebagaimana Irak digunakan alat untuk mengecilkan iran, namun hasilnya terbukti perang 8 tahun Iran tetap eksis dan kemampuan teknologi persenjataan dan kemajuan energy nuklir terus berkembang.

Sehingga memang betul suatu sinyalemen yang disampaikan mantan kepala dinas rahasia Mossad yang mengatakan kalau betul-betul Israel menyerang secara militer kepada iran,



komisi I Bidang Luar Negeri DPR RI saat menerima Duta Besar Iran untuk Indonesia Mahmoud Farazande

akan menciptakan kerusakan yang luar biasa, dan akan menimbulkan gelombang kawasan dan mendunia. “itu gertakan Israel yang tidak happy terhadap iran yang tetap eksis sebagai salah satu poros kekuatan di kawasan itu,” tegasnya.

Selanjutnya, dia mengatakan sudah ada permintaan dari Pemerintah Republik Islam Iran kepada pemerintah Indonesia untuk berperan aktif. Presiden Iran Ahmadinejad pernah ke Indonesia, setelah 3 negara brazil, turki dan iran, yang telah ada pembicaraan tetapi ditolak oleh Amerika dan badan dunia IAEA, lalu mereka melayangkan surat kepada Indonesia untuk berperan dalam melakukan mediasinya,” paparnya.

Komisi I membahas hal ini dengan Pemerintah dalam hal ini Menteri Luar Negeri mengenai sikap politik Indonesia mengenai isu ini.

Mahfudz Siddiq mengatakan Parlemen Indonesia memberikan isyarat kepada Israel dan Amerika bahwa me-

reka tidak bisa bersikap dan bertindak sewenang-wenang atas dalih yang tidak bisa mereka pertanggungjawabkan sebagaimana terjadi di Irak yang tidak bisa mereka buktikan. “Kita memberikan sinyal itu tidak boleh terkaji di Negara lain termasuk di iran,” katanya.

Indonesia telah meratifikasi The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, berkomitmen untuk tidak mengembangkan nuklir untuk persenjataan, dan meminta kepada negara-negara yang masih mengembangkan dan belum meratifikasi harus tunduk seperti Israel dan amerika, tidak boleh ada tindakan militer dari apa yang terjadi Iran.

Sebagai islam sebagai Negara islam terbesar di dunia, peran politik Indonesia di mata dunia masih diperhitungkan, Indonesia di bawah perubahan kawasan seperti yang terjadi sekarang, harus melakukan penyesuaian kebijakan politik dan harus mengambil peran yang lebih besar. (as) foto: iw/ tim parle

Ketua DPR RI dan Sejumlah Anggota Komisi X Tinjau Pembukaan SEA Games

Ketua DPR RI Marzuki Alie bersama sejumlah anggota Komisi X DPR RI turut menghadiri acara pembukaan Pekan Olahraga Asia Tenggara atau SEA Games ke 26 yang berlangsung di stadion Gelora Bumi Sriwijaya di Kompleks Jakabaring Sport City (JSC) Kota Palembang Sumatera Selatan (11/11).



Ketua DPR RI bersama sejumlah Anggota komisi X DPR saat menghadiri acara pembukaan Sea Games Ke-26 di stadion Gelora Bumi Sriwijaya Komplek Jakabaring, Palembang Sumatera Selatan.



Diitemui wartawan sesaat sebelum memasuki pintu VVIP Stadion Jakabaring, Ketua DPR RI Marzuki Alie mengatakan penanganan keamanan di sekitar kompleks olahraga Jakabaring selama pelaksanaan SEA Games relatif baik. "Sampai saat ini keamanan relatif baik, tidak kita dengar sesuatu yang mengkhawatirkan,"

ucapnya. Kepada para wartawan Marzuki menjelaskan, di samping menjadi tuan rumah pelaksanaan SEA Games ke-26 bersama Jakarta, kota Palembang juga akan menjadi tuan rumah acara Pertemuan Pemimpin Parlemen negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) atau PUIC-Parliamentary Union of The OIC Member

States, di mana Ketua DPR RI Marzuki Alie saat ini menjadi presidennya. "Tahun depan tepatnya di bulan Januari 2012, Palembang akan menjadi tuan rumah pertemuan PUIC, saya harap masyarakat Palembang dapat menjadi tuan rumah yang baik," tukasnya seraya bergegas memasuki tribun kehormatan.

Acara pembukaan SEA Games ke-26 berlangsung sangat megah dan meriah, didukung oleh permainan kembang api, teknologi animasi dan tata cahaya dengan melibatkan 3500 penari dan beberapa orang penyanyi dari beberapa negara ASEAN, juga melibatkan ribuan pelajar kota Palembang, menyajikan atraksi yang bertemakan "Sriwijaya the Golden Peninsula", atraksi itu memukau ribuan penonton dan tamu undangan yang hadir di stadion Jakabaring dan jutaan pasang mata yang mononton melalui siaran langsung di televisi.

Secara resmi SEA Games XXVI dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden berharap Indonesia sukses menjadi penyelenggara dan sukses meraih prestasi yang membanggakan bagi Indonesia dan ASEAN. "Saya berharap para atlet bisa meraih prestasi tertinggi tidak hanya menjadi kebanggaan negara masing-masing dan ASEAN, bahkan dunia." Ucap Presiden.

Puncak acara pembukaan ditandai dengan penyalakan obor di kaldron yang dilakukan oleh legenda bulu-tangkis Indonesia peraih medali emas Olimpiade Susi Susanti. Susi "terbang" dari puncak tiang layar perahu menuju kaldron, kemudian melemparkan tombak untuk menyalakan api di kaldron menandai dimulainya pesta olahraga negara-negara Asia Tenggara. Api akan menyala hingga 22 November 2011 mendatang. SEA Games XXVI di Jakarta dan Palembang mempertandingkan 43 cabang olahraga dan memperebutkan total 542 medali emas diikuti 11 negara anggota ASEAN. (Rn. Tvp) Foto : Gur

Komisi I DPR Dukung Anggaran Perumahan Bagi Prajurit TNI

Berdasarkan informasi, baru 40% prajurit TNI AD di Sulawesi Tenggara yang mempunyai rumah, sementara 60% sisanya belum memiliki rumah tinggal sendiri. Hal itu mengemuka saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi DPR RI dengan Komanda Korem 132/Tadulako Kolonel (Inf) Muslimin Akib, Komandan Lanal Palu Kolonel Laut (P) Budi Utomo dan Kepala Dinas Operasi Pangkalan Udara Sultan Hasanuddin Kolonel PNB Palito Sitorus. Pertemuan berlangsung di Markas Korem 132/Tadulako.

“DPR telah menyetujui alokasi anggaran untuk perumahan dan kendaraan operasional TNI pada APBN 2012,” ungkapnya. Tubagus mengatakan prajurit TNI tidak boleh berbisnis dan tidak boleh berpolitik serta harus profesional. Untuk itu konsekwensinya negara harus menjamin kesejahteraannya dan seluruh perlengkapan persenjataannya. Tubagus mengungkap tidak hanya per-

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin mengatakan Komisi I siap membantu anggaran perumahan bagi prajurit TNI dan kendaraan operasional bagi TNI Angkatan Darat di Sulawesi Tenggara.

soalan perumahan yang masih kurang di Sulteng, kendaraan operasional pun sangat kurang.

“Bagaimana mobilisasi prajurit TNI bisa cepat ke lokasi kejadian jika kendaraan operasional tidak ada,” tukasnya. Tubagus mengatakan Sulawesi Tenggara di samping wilayahnya yang luas, potensi konflik pun cukup besar, untuk itu dirinya meminta agar pihak Korem 132/Tadulako dapat memberikan masukan secara tertulis mengenai berbagai kebutuhan prajurit di lapangan dalam menjalankan tugas.

Anggota Komisi I DPR RI Sidharto Danusubroto (F-PDIP) mengungkapkan keprihatinannya mengenai kondisi

alutsista yang dimiliki TNI yang sangat tertinggal jika dibandingkan dengan negara tetangga. “Kita sering diprovokasi oleh militer negara tetangga, hal ini tidak akan terjadi jika alutsista kita lebih baik,” ungkapnya. Sidharto menambahkan, kekuatan TNI Angkatan Laut kita harus diperkuat terutama untuk menjaga wilayah NKRI yang berbatasan dengan negara tetangga. “Marine power kita harus diperkuat,” tegasnya.

Selain melakukan pertemuan, Tim Komisi I DPR juga meninjau perumahan milik anggota TNI dan mengunjungi Batalyon Infantri (Yonif) 711/Raksatama serta pengkalan TNI Angkatan Laut. (Wrj.Tvp) foto:tim parle



Tim Kunjungan Kerja Komisi I DPR saat mengunjungi markas korem 132/Tadulako Sulawesi Tenggara

Konflik Papua Belum Meratanya Kesejahteraan dan Keadilan

Permasalahan konflik yang ada di Papua sebenarnya adalah rasa ketidakadilan dan belum meratanya kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat Papua. Seperti pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja.



Pimpinan DPR RI saat pelaksanaan Sidang Paripurna salahsatunya membahas permasalahan papua

“Masyarakat Papua ingin dihargai sebagai manusia yang bermartabat, untuk itulah perlu dilakukan dialog secara konstruktif dalam menciptakan kedamaian di bumi Papua,” ungkap Ketua DPR RI, Marzuki Alie di depan Sidang Paripurna baru-baru ini.

Marzuki menambahkan, permasalahan yang berkembang di wilayah Papua telah menyita perhatian dan menjadi sorotan kita. Yaitu, isu separatisme, kesenjangan sosial-ekonomi, dan rasa ketidakadilan, serta konflik antara karyawan dan manajemen PT. Freeport Indonesia.

DPR mendesak kepada manajemen PT. Freeport untuk penyelesaian masalah ini agar memperhatikan tuntutan karyawan. Manajemen PT. Freeport harus melakukan dialog dengan karyawan untuk menyelesaikan permasalahan dengan mengedepankan sisi kesejahteraan, keadilan, dan kemanu-

siaan. “Pemerintah berkewajiban untuk memfasilitasi dan memediasi supaya permasalahannya dapat diselesaikan dengan baik,” ujar Marzuki.

Menurutnya, semua permasalahan ini memerlukan penanganan serius, tidak hanya pernyataan keprihatinan saja, tetapi harus dibarengi dengan langkah-langkah konkret dari pemerintah, tambahnya.

Lebih jauh Marzuki mengatakan, Provinsi Papua dan Papua Barat sebenarnya telah mendapatkan status otonomi khusus berdasarkan UU No.21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang telah dibuahkan dengan UU No.35 tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU No.21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Pemberian otonomi khusus, lanjutnya, merupakan kebijakan politik

yang tepat, merupakan langkah awal untuk membangun kepercayaan masyarakat Papua. Dana otonomi khusus yang telah dikururkan mencapai Rp 30 triliun, tetapi masyarakat Papua tidak merasa ada peningkatan kesejahteraan. “Karena otonomi khusus tidak berjalan efektif dan amanat UU ini belum dilaksanakan secara maksimal. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan UU Otonomi Khusus dan tata kelola otonomi khusus harus diperbaiki,” tegasnya.

DPR juga mendesak kepada pemerintah agar dilakukan langkah-langkah konkret yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan. “Ini adalah pekerjaan rumah dan tanggungjawab kita semua, bagaimana mendorong kesadaran generasi muda Papua sebagai bagian dari bangsa Indonesia, bagaimana Papua merasa memiliki Indonesia,” tutur Marzuki.(iw)/foto:iw/parle.

Kota Solo Siap Gelar ASEAN PARAGAMES Ke-6

Setelah kota Palembang dan Jakarta menjadi tuan rumah penyelenggaraan SEA Games ke-26, kini kota Surakarta atau yang lebih dikenal dengan sebutan kota Solo di provinsi Jawa Tengah sedang bersiap menggelar pekan olahraga bagi para penyandang disabilitas atau ASEAN PARAGAMES ke-6.



Kunjungan Spesifik komisi X DPR saat meninjau persiapan Asean Paragames ke-6 di Solo, Jawa Tengah

Perhelatan ini akan berlangsung 12-22 Desember 2011 yang akan datang. Berbagai persiapan baik sarana pertandingan atau venues, wisma atlet, sarana transportasi, dan sarana pendukung lainnya sedang terus dikerjakan oleh panitia penyelenggara (INASPOC-The Indonesia South East Asian Para Games Organizing Committee) bersama pemerintah provinsi Jawa Tengah dan pemerintah kota Solo. Hal itu mengemuka saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI dengan gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo, Walikota Solo Joko Widodo, KONI, Kemenpora, dan INASPOC yang berlangsung di Diamond Convention Center Solo, Jawa Tengah, Jumat (18/11).

Ketua Tim Komisi X DPR RI Parilindungan Hutabarat (F-PD) mengatakan kedatangan Tim Komisi X ke Solo adalah untuk melihat dari dekat dan mendengarkan berbagai hal terkait persiapan

penyelenggaraan ASEAN Para Games ke-6. Parilindungan mengungkapkan, begitu mendarat di Solo, tim langsung meninjau beberapa tempat yang akan menjadi venue pertandingan. "Tadi kami sempat ke stadion Sriwedari dan Kompleks Stadion Manahan, secara umum persiapan fisik baik, hanya penyelesaian akhir yang dalam proses," ujarnya menjelaskan. Ketua Tim menambahkan, event ini adalah hajat bangsa Indonesia, pelaksananya pun bangsa sendiri. Oleh karena itu, anggota Komisi X dari fraksi partai Demokrat ini mengajak kepada semua pihak, jika masih ada kekurangan agar diselesaikan bersama. "Ini semua demi bangsa Indonesia, ini demi merah putih," tegasnya mengingatkan.

Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo dalam pemaparannya menjelaskan, terkait penyelenggaraan ASEAN Para Games ke-6 ini pemprov Jawa Tengah mendapat tugas dari pemerintah pusat untuk merenovasi kampung atlet di

Asrama Haji Donohudan, menyediakan 10 bus khusus untuk transportasi atlet dan official, merenovasi 7 venues dan menyewa 4 venues lainnya. " Secara keseluruhan persiapan sudah mencapai 85-90%," kata Gubernur. " Mudah-mudahan tanggal 3 Desember 2011 semua venues dan asrama siap digunakan," tambahnya. Bibit menjelaskan renovasi asrama haji Donohudan agak terlambat penyelesaiannya, mengingat asrama ini masih digunakan bagi jamaah haji. " Saya sudah meminta bantuan Panglima Kodam IV/Diponegoro untuk mengirimkan 50 orang prajuritnya untuk membantu membersihkan asrama Donohudan," ucapnya.

Terkait anggaran, gubernur mengatakan untuk renovasi asrama Donohudan anggaran yang disediakan 20 milyar Rupiah, namun anggaran itu baru turun 2 minggu yang lalu. " Kita perbaikan pintu-pintu, kamar, kamar mandi khusus bagi penyandang disabilitas, dan lift," kata mantan Pangdam Jaya ini. Kepada pemerintah pusat dirinya berharap dalam waktu dekat semua dana yang dibutuhkan cepat dicairkan demi lancarnya event ini. " 9 Bus sudah siap, tinggal 1 lagi yang masih dikerjakan, akhir November diharapkan selesai," tambahnya.

Walikota Solo Joko Widodo atau yang lebih dikenal dengan Jokowi mengatakan, masyarakat kota Solo siap menyambut para tamu dan menjadi tuan rumah yang baik bagi para atlet dari 11 negara anggota ASEAN. "Kami siap memberikan yang terbaik kepada para tamu, bahkan kita akan lakukan kirab budaya," kata walikota yang dikenal sederhana ini.

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke kota Solo : Parilindungan Hutabarat, Rinto Subekti (F-PD), HM. Nasrudin, Hj. Harbiah Salahuddin (F-PG), H. Irsal Yunus, Itet Tridjayati Sumarijanto (F-PDIP), H. Nasrullah (F-PAN). (Rn.Tvp) foto:rn/parle

DPR Bangga Prestasi Atlet Indonesia Di Sea Games

Komisi X DPR RI yang membidangi olah raga bangga terhadap prestasi Atlet Indonesia pada ajang kompetisi olahraga kawasan Asia tenggara Sea Games.



Komisi X saat meninjau langsung pelaksanaan Sea Games ke-26 di Gelora Bung Karno Jakarta

“Juara umum untuk Indonesia, Kami bangga dengan Prestasi Atlet Indonesia,” kata Wakil Ketua Komisi X Rully Chairul Azwar.

Saat memimpin Komisi X DPR RI meninjau pelaksanaan Sea Games XXVII, pada venue bowling, layar, dan BMX di Ancol dan Venue wushu, panahan, dan bulutangkis di Gelora Bung Karno, Jum’at (18/11), Jakarta.

Secara umum dilihat dengan segala kekurangannya semua berjalan dengan baik. Namun Rully menginginkan jika Indonesia ingin mengadakan event internasional seperti ini jangan dadakan. Sehingga diharapkan perencanaan, dan persiapan, dapat dilaksanakan dengan baik. “nilainya tidak exelent tapi cukup baik, kalau prestasi dinilai exelent mendekati juara umum,” katanya.

Setelah meninjau, Venue BMX, Rully mendukung rencana penyerahan pengelolaannya kepada Koni, karena dapat dipergunakan oleh PB yang bersangkutan untuk pembinaan atlet. Lokasi venue BMX sepenuhnya milik pengelola Taman Impian Jaya Ancol dan akan diadakan MoU dengan Pemerintah untuk diserahkan

ke pengelolaannya dalam pengembangan atlet.

Mengenai peningkatan kesejahteraan atlet, telah dibicarakan berulang-ulang di tingkat komisi dengan kemenpora, “Atlet yang berprestasi, yang kemudian tidak dapat bertanding lagi jangan disia-siakan begitu saja,” tegas Rully.

Dalam jangka pendek Atlet yang berprestasi diberikan bonus, seperti pada Sea Games, yang mendapatkan emas akan mendapatkan 200 juta, perak 50 juta dan perunggu 30 juta. Tetapi yang lebih penting dari itu pada mereka yang berprestasi yang sekaligus mengharumkan nama baik bangsa mendapatkan insentif.

Kesulitannya Pemerintah tidak sanggup untuk memberikan standar kesejahteraan, namun Rully tetap mengusulkan atlet diberikan sesuatu yang bersifat langgeng, yang sedang dipikirkan saat ini adalah pemberian penghargaan dan pekerjaan tetap, kalau diberikan cepat habis.

Selain itu, dunia industry juga dapat berperan dalam mendukung prestasi atlet. Seorang atlet yang sukses dalam

suatu cabang olah raga dapat menarik iklan yang luar biasa. Namun sampai sekarang industri olahraga dirasakan belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu, menurutnya selama industri olah raga belum dikondisikan dengan baik oleh pemerintah. “Prestasi tergantung pada APBN, walaupun ada masyarakat swasta memberikan perhatian namun tidak bersifat continue,” paparnya.

Terkait pembibitan, pemerintah tengah memulai sistem baru, tidak lagi menggunakan sistem Pelatnas, namun Kemenpora sekarang menggunakan sistem prima, tetapi yang penting pembibitan harus dibangun dari bawah, bertingkat dari daerah sampai pusat. Pembinaan dengan program PPID dan PPLM sangat bagus, namun anggaran kemenpora selalu tidak dapat dimantapkan seperti yang diharapkan, karena ada anggaran tambahan seperti penyelenggaraan PON atau event internasional lainnya.

Eko Hendro Purnomo, Bersyukur posisi Indonesia juara umum di depan mata, tetapi akan lebih baiknya jika PB-PB yang ada di support sepenuhnya agar tidak terjadi atlet membawa alat sendiri, ini amat disayangkan. “Atlet telah berlatih sangat keras seharusnya disupport penuh oleh PB atau KONI,” tegas anggota dari Fraksi Partai Amanat Nasional itu.

Selain itu, berdasarkan pengamatannya Olah raga bulutangkis yang merupakan salah satu cabang olah raga merupakan permainan yang telah lama menjadi kebanggaan bangsa Indonesia, namun gedung yang digunakan dirasakan tidak ada perubahan yang berarti, ditambah lagi ketika digunakan pada Sea Games ini sempat ketika hujan terjadi bocor. “Kita punya tempat dan sarana yang banyak jadi kedepan hal ini jangan sampai terjadi,” katanya.

PBSI harus berkoordinasi dengan Koni dan Kemenpora untuk membiayai renovasi, karena hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan Pemerintah DKI. (as) foto:as/tim parle

Atlet Para Games Keluhkan Peralatan yang Kurang Memadai

Hal itu mereka sampaikan kepada anggota Tim Komisi X DPR RI yang sedang melakukan peninjauan di arena tenis di kompleks olahraga Manahan Solo, Jumat (18/11). Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI yang dipimpin Parliungan Hutabarat dalam rangka persiapan penyelenggaraan ASEAN PARAGAMES ke-6 di kota Solo melakukan peninjauan ke beberapa venues pertandingan di Stadion Sriwedari dan Manahan.

“Kalau fisik kami tidak kalah dengan atlet negara lain, tapi kursi roda kami lebih lambat dari mereka karena tidak standard, kami perlu tiga kali putar sementara mereka cukup sekali,” kata para atlet serempak. Anggota Tim Komisi X Hj. Harbiah Salahuddin (F-PG) mengaku terkejut mendengar keluhan para atlet, mengingat anggaran untuk event ini sudah lama disetujui Komisi X DPR RI. “Kebutuhan kursi roda ini harus segera dipenuhi, masak hal seperti ini kita abaikan, fisik mereka OK hanya alat yang tidak mendukung,” katanya menjelaskan. Harbiah menambahkan persoalan ini akan dibicarakan saat rapat dengan Kempora di DPR nanti.

Anggota Tim Komisi X Irsal Yunus (F-PDIP) menambahkan raket yang digunakan para atlet pun terlalu berat, dan senarnya tidak standard. Irsal mengatakan sebenarnya persoalan ini tidak perlu terjadi jika semua pihak yang terkait bekerja secara profesional. “Bagaimana bisa juara jika alatnya tidak mendukung,” katanya mempertanyakan. Irsal mengingatkan kejadian di Palembang saat SEAGames diharapkan

Para atlet Indonesia yang dipersiapkan untuk mengikuti ASEAN Para Games ke-6 di Solo mengeluhkan kurangnya sarana dan prasarana utama pertandingan, seperti kursi roda yang kualitasnya di bawah standard, raket tenis yang juga dalam kondisi hampir rusak.



Kunjungan Spesifik komisi X DPR saat meninjau persiapan Asean Paragames ke-6 di Solo, Jawa Tengah

kan tidak terjadi di Solo. “Pengalaman di Palembang menjadi pelajaran yang sangat berharga,” ucapnya.

Rinto Subekti (F-PD) anggota Tim Komisi X mengatakan, Ada tiga sasaran yang ingin dicapai dalam setiap penyelenggaraan pesta olahraga, yaitu sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, dan sukses pemberdayaan ekonomi. Setiap event besar harus juga mampu memberdayakan perekonomian masyarakat setempat. “Kejadian di Palembang secara prestasi baik, namun penyelenggaraannya dinilai kurang baik,” katanya memaparkan. Rinto menambahkan promosi dan publikasi pun harus lebih gencar dilakukan untuk melibatkan partisipasi aktif masyarakat. “Masak event sebesar ini tidak ada penontonnya,” ucap

anggota DPR dari Surakarta ini.

Deputi Kemempora, Jeffry Pa-laar mengatakan terlambatnya pengadaan kursi roda dikarenakan surat permintaan yang masuk ke Kemempora tidak dilengkapi spesifikasi teknis yang memadai, sehingga menyulitkan proses pengadaannya. Surat permintaannya baru masuk ke kami minggu lalu, mudah-mudahan minggu depan semua kebutuhan atlet bisa dipenuhi,” Ujarnya meyakinkan. Anggota Tim Komisi X H. Nasrullah mengingatkan agar jika terjadi keterlambatan jangan menyalahkan pemerintah daerah, karena event ini adalah hajatnya pemerintah pusat yang didukung oleh pemerintah daerah. (Rn. Tvp) foto:Rn/parle

DPR Apresiasi Kehadiran UP4B

“Selaku ketua Tim Pengawaas Papua dan Aceh, saya menilai beliau merupakan orang yang kompeten dan seringkali ditugaskan di daerah konflik seperti Aceh dan Papua,” kata Priyo saat konferensi pers, di Gedung DPR, Jum’at, (18/11).

Menurutnya, lembaga birokrasi

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyambut baik kehadiran lembaga Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Bambang Darmono.

baru ini diharapkan dapat menjadi lembaga dalam menjembatani komunikasi antara pusat dan Jakarta, termasuk

juga dalam hubungan mengharmoniskan kembali disharmoni yang terjadi antara Pusat dan kelompok yang ber-

tikai di Papua. “UP4B ini bertujuan untuk mempercepat UU otsus Papua jadi jangan dijadikan pertentangan dengan UU No.21 tahun 2001 tentang Otsus Papua,”paparnya.

Priyo menilai terdapat persoalan krusial tentang UU otsus papua dan



Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso

terlihat adanya kendala di pemerintah pusat juga Pemda disana. “Maklumat UU otsus Papua ini ada turunan pasal yg belum diturunkan dengan baik artinya ada 3 Peraturan Pemerintah (PP) yang harus dituntaskan,”tandasnya.

Dia menambahkan, yang sudah disusun yaitu terkait pembentukan Masyarakat Rakyat Papua (MRP), sementara lambang daerah, fungsi dan kedudukan gubernur dan tata krama keuangan belum secara substansi menjawab PP yang ada. “Karena itu DPR meminta Menkopolkukam mempercepat semuanya terkait PP yang masih belum jelas,”katanya.

Sementara di Papua sendiri, masih belum dibentuk semacam Perdasus dan Perdasi dalam otsus Papua. “Penyusunan Perda khusus harus mendapat pertimbangan MRP, sementara Per-

dasi persetujuan Gubernur dan DPRD, sampai sekarang belum ada Perdasus dan Perdasi yang mengatur dana otsus karena terdapat sekitar Rp 28 Triliun dana otsus termasuk dana infrastruktur yang harus dipertanggungjawabkan.

Dia menambahkan, Pasal 78 UU otsus Papua menyebutkan pelaksanaan UU 21/2001 ini dievaluasi setiap tahun dan untuk pertama kalinya dilakukan pada akhir tahun ketiga sesudah UU berlaku, belum dilaksanakan secara konsekuen dan sesuai kehendak masyarakat lokal di Papua.

Selain itu, jelas Priyo, segala bentuk makar dan kekerasan di Papua harus diusut sumbernya baik dari oknum aparat, OPM dan organisasi tanpa bentuk. “Artinya negara harus mampu menjamin rasa keamanan bagi masyarakat papua,”tegasnya. (si) foto:tim parle

Rak Koperasi SETJEN DPR 2011

Pengurus Diminta Menjelaskan secara Detail Pengelolaan Koperasi

Sekjen DPR RI, Nining Indra Shaleh meminta pengurus dan pengawas koperasi setjen DPR RI memberi penjelasan yang sedetailnya atas pengelolaan koperasi yang dilakukan sehingga sasaran yang akan dicapai dapat lebih realistis dan objektif untuk dijadikan pedoman kerja.

“Lebih jauh hal ini dapat menjadi alat kontrol bagi anggota terhadap proses pengelolaan koperasi di tahun yang akan datang,” demikian kata Nining sesaat sebelum membuka Rapat Anggota Khusus (RAK) dan Pendidikan Perkoperasian Tahun 2011 Sekretaris Jenderal DPR RI, 18/11/2011 di Gedung DPR RI.

Nining juga meminta agar anggota yang koperasi Setjen DPR dapat memanfaatkan seoptimal mungkin untuk melakukan pendidikan sehingga koperasi mendapatkan kader-kader terbaik bagi kemajuan koperasi itu sendiri.

PUJASERA Icon Keberhasilan Koperasi Setjen DPR RI

Pujasera menjadi salah satu icon keberhasilan Koperasi Setjen DPR RI. Dengan wajah dan tampilan baru yang lebih terang dan tertata. Keberadaan pujasera sangat penting karena kualitas kontribusinya telah mem-

berikan keuntungan koperasi sebesar Rp. 272.305.733,- atau sebesar 50,09% dari targetnya.

“Koperasi Setjen DPR RI secara bertahap mampu merespon berbagai perubahan untuk kemajuan jadinya sebagai badan usaha yang dimiliki oleh anggotanya,” ungkap Nining. Ditunjukkan dengan semakin meningkatnya kualitas dan varian kontribusi Koperasi kepada anggotanya, bahkan produktivitasnya dalam Semester I tahun 2011 ini telah mampu menciptakan pendapatan sebesar Rp. 2.342.266.969,- atau terrealisasi sebesar 56,84% dari target tahun 2011, tambah Nining.

Indikator kemajuan Koperasi Setjen DPR RI pada saat ini dicirikan pula dengan adanya keragaman manfaat serta pembenahan kebijakan pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan anggota. Seperti keragaman layanan usaha, Pembiayaan Pembelian Rumah sampai senilai 200 juta, pembiayaan multi gunasampai dengan 100

juta dan pinjaman regular yang direncanakan untuk ditingkatkan plafonnya hingga 15 juta rupiah. Khusus untuk Pembiayaan Dana Talangan Haji yang mulai diluncurkan tahun ini, dengan nilai talangan maksimal 22,5 juta, jasa 0 persen dan target waktu pengembalian hingga 3 tahun.

Selain dari peningkatan layanan dan SHU, pada saat ini Koperasi telah memberikan beberapa manfaat tambahan kepada para anggota seperti Asuransi Full Medicare, bingkisan lebaran untuk seluruh anggota serta unsur lain sebagai interpretasi Corporate Social Responsibility (CSR) koperasi, Paket Umroh dan wisata rohani yang berasal dari undian pinjaman insidentil dan undian belanja di Toserba dan Pujasera.

Koperasi Setjen DPR RI juga berencana untuk memiliki dan mengelola Wismadan Ruko menjadi bagian inovasi pada rencana pengembangan usaha saat yang akandatang. (lssmg)

Statement Mahfud Cambuk DPR Tuntaskan Target Legislasi

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan, sinyalemen dugaan Ketua MK Mahfud MD bahwa terjadi praktek jual beli ayat UU di DPR harus disikapi dengan arif dan bijaksana.

Statement tersebut sebagai bahan introspeksi diri bagi seluruh anggota Dewan dan cambuk bagi DPR untuk koreksi total agar dapat bekerja lebih keras lagi menuntaskan tugas legislasinya.

“Saya mengucapkan terima kasih atas sinyalemen dugaan Pak Mahfudz ini, dengan perasaan kecewa kita harus segera mengintrospeksi diri,” kata Priyo saat konferensi pers di Gedung DPR, Jum’at, (18/11).

Menurutnya, praktek jual beli pasal itu tidak dibenarkan dilakukan oleh oknum anggota dewan karena itu, tegas Priyo, DPR akan menindak tegas apabila terbukti terjadi praktek ilegal itu. “Jika ketahuan BK DPR harus memprosesnya tidak peduli apakah oknum tersebut memegang jabatan atau tidak,” tandasnya.

Pada kesempatan tersebut, Priyo berpesan kepada Ketua MK agar mengeluarkan statement lebih terukur dan menjunjung sikap saling hormat antar lembaga negara. “Sebagai lembaga negara DPR maupun MK harus memberangus praktek ilegal tersebut jika memang terbukti,” paparnya.

Dia menambahkan, DPR tidak boleh berkecil hati dengan pernyataan Ketua MK tersebut yang utama bagi seluruh anggota DPR adalah sebagai bahan koreksi dan itikad baik guna menghindari praktek ilegal itu.

Sebelumnya di berbagai media massa, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyatakan, modus jual beli pasal undang-undang (UU) di DPR seperti yang diungkapkan sebelumnya sudah terbukti. Contohnya, beberapa kasus sudah diputus di pengadilan. Bukti yang dimaksud Mahfud di putusan pengadilan itu adalah, 5 orang yang dihukum karena mengeluarkan dana Yayasan BI sebesar Rp 100 miliar untuk menggolkan Undang-Undang Bank Indonesia merupakan bukti adanya jual beli pasal. Karena menurutnya, di pe-



Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso

ngadilan terbuka bahwa uang Rp 68 miliar untuk pengacara, Rp 31 miliar untuk DPR. “Apa Anda mau membantah fakta yang terbuka di persidangan bahwa ini untuk DPR. Apa itu bukan bukti?” tegas Mahfud saat itu kepada wartawan.

Contoh lain ungkap Mahfud, Dana Abadi Umat sebesar Rp 1,5 miliar yang dibayarkan ke DPR untuk menggolkan UU Wakaf, merupakan bukti berikutnya. Menurutnya, Menteri Agama yang dulu sendiri yang mengatakan hal itu.

Bukti ketiga lanjut Mahfud adalah tentang mafia anggaran yang diungkap oleh politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Wa Ode Nurhayati bahwa ada calo anggaran APBN yang dipotong setiap proyek sebesar 6 persen.

Contoh keempat, terkait kasus suap



Ketua MK, Mahfud MD

terkait di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (kemenakertrans) yang sedang mengadili sekretaris Muhaemin Iskandar. Dalam persidangan terungkap, sejumlah uang juga untuk membayar UU APBN perubahan. (si) foto: tim parle



Ketua DPR RI Marzuki Alie bersama sejumlah anggota Komisi X DPR RI menghadiri acara pembukaan SEA Games ke 26 di stadion Gelora Bumi Sriwijaya di Kompleks Jakabaring Sport City (JSC), Palembang Sumatera Selatan.
11 November 2011. foto:IG



Kunjungan Grup Kerja Sama Bilateral (GKS) DPR RI ke Parlemen Korea Utara yang dilakukan pada tanggal 6-12 November 2011. foto:Parle



Komisi X DPR melakukan Kunjungan Lapangan ke stadion Gelora Bumi Sriwijaya di Kompleks Jakabaring untuk melihat langsung bagaimana pelaksanaan Sea Games ke XXVI.
17 November 2011. foto:IW



Rapat Anggota Khusus dan Pendidikan Perkoperasian yang diadakan Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI.
18-20 November 2011. foto:tr